

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bruggink, J.J.H., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Institute, Worldwatch, 1996, *State of the World 1996*, W.W. Norton & Company, New York and London.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kitay, Michael G., 1985, *Land Acquisition in Developing Countries Policies and Procedures of the Public Sector*, Lincoln Institute of Land Policy Book, Boston.
- Manan, Bagir, Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Moeljatno, 2014, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Puluh Dua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, PT Alumni, Bandung.
- N.D., Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan, Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam Belas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Edisi Satu, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11).

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874).

Surat Keputusan Kepala BPN-RI No. 3296/Kep-100.18/IV/2013.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 399/Kep-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018.

C. Internet

Anonim, “Perpres Lahan Pertanian Berkelanjutan Disiapkan”, Tersedia di: <https://www.ucnews.id/news/Perpres-Lahan-Pertanian-Berkelanjutan-Disiapkan/2373024540512871.html>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

Anonim, “Perpres Lahan Pertanian Berkelanjutan Disiapkan”, Tersedia di: <http://industri.bisnis.com/read/20181031/99/855434/perpres-lahan->

[pertanian-berkelanjutan-disiapkan](#), diakses pada tanggal 27 November 2018.

Geospasial, Badan Informasi, “Kick Off Meeting Verifikasi Lahan Sawah”, Tersedia di: <http://www.big.go.id/berita-surta/show/kick-off-meeting-verifikasi-lahan-sawah>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

Madiun, Badan Pusat Statistik Kabupaten, “Kabupaten Madiun Dalam Angka (Madiun Regency in Figures) 2018”, Tersedia di: <https://madiunkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/ed2fe46d4fb0702d780289dd/kabupaten-madiun-dalam-angka-2018.html>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum, “Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan”, Tersedia di: http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2018.

Nasional, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)”, Tersedia di: [https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan_\(LP2B\).pdf](https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan_(LP2B).pdf), diakses pada tanggal 07 Agustus 2017.

Rachmat, Muchjidin, Chaerul Muslim, “Peran dan Tantangan Implementasi UU 41/2009 Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, Tersedia di: <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/kemandirian-pangan-indonesia/BAB-II-2.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2017.

RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf, diakses pada tanggal 21 April 2018.

Statistik, Badan Pusat, “Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2015”, Tersedia di: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2015.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

D. Artikel Suatu Jurnal, Surat Kabar, Diskusi

Hariyadi, Purwiyatno, “Riset dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan”, *Jurnal Diplomasi*, Vol. 3, No. 3, September, 2011.

Iqbal, Muhammad, Sumaryanto, “Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat”, *Analisis Kebijakan Publik*, Volume 5, Nomor 2, Juni, 2007.

Isa, Iwan, “Kebijakan dan Permasalahan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan”, *Prosiding Seminar Revitalisasi Ketahanan Pangan: Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Pedesaan*, ISBN: 979-3566-53-1, November, 2006.

J., Paschalia Judith, “Lahan Pangan Terus Beralih Fungsi”, *Kompas*, 21 November 2018.

Sumardjono, Maria S.W., “Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan”, disampaikan dalam Forum Diskusi “Alternatif” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 21 Februari 1994.

E. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Gunarto, Marcus Priyo, “Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Handari, MF. Anita Widhy, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Janti, Gesthi Ika, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

K., Azizah Noor Laili, “Perwujudan Ketahanan Pangan Lokal (Studi Pada Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/PLP2B di Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Megawati, Galuh Kartika Dewi, “Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Subekti, Deny Cahyo, “Konversi Lahan Sawah dan Peranannya Dalam Usulan Perlindungan Lahan Sawah Berkelanjutan di Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.